

**KINERJA APARATUR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

Rifky Maulana
NPP. 28.0890

*Asdaf Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Manajemen Sumber Aparatur*

Email: rifkymaulana@gmail.com

ABSTRACT

Kapuas Regency is one of the areas in Central Kalimantan Province which is always hit by forest and land fires every year that requires mitigation so that it does not happen more badly than before. Seeing this problem, the author is interested in researching it as a final report entitled "PERFORMANCE OF APPARATUS IN FOREST AND LAND FIRE DISASTER MANAGEMENT IN THE REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) KAPUAS REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE". This study uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the author's observations and analysis, the performance of the apparatus in forest and land fire disaster management at the Regional Disaster Management Agency of Kapuas Regency has been running optimally according to its main duties and functions. There are several factors that hinder the management of forest and land fires, such as the large area of Kapuas Regency and difficult access because there are areas that must be passed through the river and the number of personnel is lacking in terms of number and ability to carry out their duties. As for the efforts that have been made by the Regional Disaster Management Agency of Kapuas Regency, namely making disaster-responsive villages to overcome remote and difficult-to-reach areas and installing warning boards for forest and land fires, and establishing coordination with private parties such as plantation companies in the village. Kapuas Regency and independent firefighters to overcome the shortage of personnel in disaster management.

Keywords: Performance, Disaster, Apparatus



ABSTRAK

Kabupaten Kapuas adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang setiap tahun selalu dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan yang memerlukan penanggulangan agar tidak terjadi lebih parah dari sebelumnya. Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk menelitinya sebagai laporan yang berjudul “KINERJA APARATUR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis penulis, kinerja aparatur dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas sudah berjalan optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ada beberapa faktor penghambat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang di hadapi seperti, luas wilayah Kabupaten Kapuas yang besar dan akses yang sulit dijangkau karena ada wilayah yang harus dilewati melalui jalur sungai dan jumlah aparatur yang kurang dari segi jumlah maupun kemampuannya dalam menjalankan tugas. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas yaitu membuat desa tanggap bencana untuk mengatasi wilayah yang jauh dan susah dijangkau serta memasang papan peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan, dan menjalin kordinasi dengan pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Desa Kabuapten Kapuas dan pemadam mandiri untuk mengatasi kekurangan personil dalam penanggulangan bencana.

Kata Kunci : Kinerja, Bencana, Aparatur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta juga diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik, hal ini menandakan bahwa wilayah Indonesia sangat luas serta terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan hujan. Maka dari itu iklim yang ada di Indonesia adalah tropis, berada di wilayah iklim tropis, membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi bencana yang tinggi dan bermacam-macam.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mendapatkan perlindungan untuk bebas dari ancaman, rasa takut, termasuk dampak akan bencana. Pemerintah diharuskan untuk memiliki suatu pola perlindungan yang efektif dan efesien dalam penanggulangan bencana (management disaster).

Dalam penanggulangan bencana semua pihak harus ikut serta berpartisipasi dan berperan aktif tidak hanya pemerintah tetapi juga unsur masyarakat juga harus ikut aktif. Pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tercantum pada huruf (c), Indonesia adalah wilayah yang rawan bencana: Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Pada tahun 2008 dibentuk lah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lembaga itu setara dengan menteri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi dan juga kabupaten/kota, terbentuknya lembaga ini dengan tujuan menyederhanakan tugas dari Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana agar lebih efektif serta kinerjanya lebih nyata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas merupakan lembaga yang memiliki tugas khusus untuk menanggulangi bencana yang ada didaerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Penanggulangan bencana merupakan proses yang dinamis, terperinci dan berkelanjutan sebagai bentuk meningkatkan kualitas dari langkah-langkah yang berkaitan dengan penanganan.

Penanggulangan bencana adalah rangkaian kegiatan yang meliputi mencegah, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi akibat bencana dan pembangunan kembali. Terjadinya bencana pada suatu wilayah di akibatkan oleh beberapa faktor seperti, faktor alam, faktor non alam, dan juga faktor sosial. Contoh bencana yang disebabkan oleh faktor alam yaitu banjir, tanah longsor dan angin topan. Bencana karena faktor non alam seperti wabah penyakit dan kebakaran. Sedangkan faktor sosial bencana yang diakibatkan oleh komunitas atau kelompok yang berbeda pendapat dan menyebabkan kerusuhan. Setiap bencana yang ada pasti memiliki resiko yang membahayakan pada daerah tersebut. Dasar yang mengatur tentang pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4 bahwa mewajibkan pemerintah untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyakbanyaknya kesejahteraan rakyat. Pemikiran ini adalah kewajiban negara secara konstitusional tersebut lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip negara, bumi, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya menjadi hajat bagi banyak orang dimiliki oleh negara untuk kehidupan orang banyak, dengan arti lain negara adalah penyelenggara kepentingan umum.

Pada awalnya membakar hutan dan lahan adalah cara untuk membuka lahan yang praktis. Di Indonesia kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang selalu ada setiap tahunnya, padahal sudah jelas peraturan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan

ini, beberapa kebijakan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. Semua peraturan perundangan-undangan itu adalah bentuk pemerintah untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi belum efektif dilihat dari bencana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia masih sering ditemukan Kinerja aparatur dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentunya harus maksimal, efektif, efisien dalam melaksanakan tugas sebagai wujud pengimplementasikan tujuan dari organisasi, karena keberhasilan suatu organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh aparatur yang berada di instansi yang berkaitan. Mangkunegara (2009:18) mengemukakan “kinerja adalah hasil kerja yang dihitung secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya.” Penilaian kinerja dari organisasi adalah hal yang penting, penilaian kinerja dilakukan untuk tolak ukur atas berhasil atau tidaknya tingkat pencapaian kinerja suatu organisasi. Karena itu perlunya indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan suatu organisasi sebagai patokan atau acuan dalam penilaian kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan manajemen bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Pada nyatanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas ketika penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sering kali tidak sesuai dengan konsep yang dicanangkan hal ini dikarenakan hambatan dan masalah yang ada dilapangan. Terbukti ketika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan masih ada saja kekurangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggaulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas ini. Faktor luas wilayah yang luas merupakan salah satunya. Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi pada setiap tahun menjadi bukti penanggulangan bencana ini masih menjadi masalah. Hal ini sejalan dengan data BPBD Kab. Kapuas bahwa pada tahun 2020 sebanyak 1457, 52Ha telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Data ini menunjukkan bahwa banyaknya luas wilayah yang terbakar menjadi masalah yang belum bisa diminimalisir setiap tahunnya. Masalah ini juga menjadi penyebab oksigen yang yang buruk bagi kesehatan masyarakat. Teradinya kebakaran hutan dan lahan bukan hanya karena bencana

alam semata banyak kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat dari kesengajaan seperti, pembukaan lahan secara sengaja agar lebih cepat, maupun kelalaian masyarakat sendiri saat membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Hal ini menunjukkan kurang kepedulian masyarakat sendiri untuk menjaga lingkungan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Kinerja Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan maupun Kinerja dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan lainnya. Penelitian Iskandar yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Iskandar, 2018), menemukan bahwa Peran aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum optimal, terlihat dari hasil penelitian yang ada dalam pembahasan menjelaskan bahwa BPBD belum bisa membantu dalam mengatasi kebakaran seperti pemukiman. Penelitian (Atul Yogo Pratmo, Deli Anhar, Abdul Wahid) *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Banjar* mengemukakan bahwa ada beberapa masalah yang menjadi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu seperti kurang anggota personil dilapangan, akses menuju tempat kejadian yang susah dan kesadaran masyarakat yang masih kurang (Atul Yogo Pratmo, Deli Anhar, Abdul Wahid, 2017). Selanjutnya penelitian Dwi Harvikayana yang berjudul *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan Di Kecamatan Patampuan Kabupaten Pinrang* mengemukakan bahwa kinerja aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki strategi dalam pengurangan resiko kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan salah satunya adalah dengan cara selalu mensosialisasikan bahaya bencana kebakaran lahan, menambah jumlah personel anggotanya. Namun ada juga beberapa hambatan seperti anggaran yang terbatas, serta

kondisi iklim yang sangat tinggi menjadi masalah yang membuat penanggulangan kebakaran lahan menjadi terhambat (Dwi Harvikayana, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian Dwi Harvikayana menggunakan analisis dengan indikator dari (Salusu, 2006), dan penelitian Iskandar menggunakan analisis pengukuran kinerja oleh *Dwiyanto (1996)*. Sedangkan penulis sendiri menggunakan analisis teori T.R Mitchell dalam Sedarmayanti (2009) yakni yang menyatakan bahwa kinerja dilihat dari 5 indikator yaitu : Kualitas Kerja, Ketepatan dan Kepemimpinan, Inisiatif, Kemampuan, dan Komunikasi. Serta penelitian yang dilakukan penulis dilakukan saat pandemi Covid-19.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif karena analisis data secara induktif adalah metode penelitian berdasarkan data maupun fakta yang dikumpulkan kemudian dapat menggambarkan permasalahan secara cermat karakteristik suatu masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Serta fokus pada pertanyaan dasar mendapatkan data dan menyampaikan fakta tanpa banyak detail yang tidak penting yang kemudian diselaraskan dengan fenomena dan pengaruhnya atau kesimpulan bersifat umum. Menurut Nazir (2014:154) mengatakan bahwa “Observasi adalah cara

pengumpulan data dengan observasi langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut, sementara Sugiyono menjelaskan bahwa, “dalam observasi partisipasi sedang dalam penelitian terdapat keseimbangan antara peneliti internal dan pihak luar. Peneliti telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan kerja, tetapi tidak semua, kegiatan dalam pengumpulan data.dengan demikian, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman ,pedengaran sentuhan dan pengecapan. Yang dikatakan dengan observasi langsung bisa diartikan dengan berpartisipasi langsung”.

Sehingga kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan yang berhubungan dengan permasalahan. Maka penulis menggunakan observasi partisipasi, dimana saat mengumpulkan data penulis menyatakan sedang melaksanakan kegiatan penelitian. Observasi dilakukan di lapangan terkait kinerja aparatur dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Pembahasan

Menurut Mangkunegara (2009:18) mengemukakan “kinerja adalah hasil kerja yang dihitung secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya.” Sedangkan menurut Wibowo (2014: 7) “Kinerja adalah hasil kerja yang terkait erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan perkembangan ekonomi”.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang di suatu organisasi secara maksimal sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar peraturan, dan sesuai dengan etika .

3.1 Kualitas Kerja

Pada umumnya kualitas kerja merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan

pemasukan (*input*) yang dibutuhkan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kualitas Kerja aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari hasil kerja. Suatu kualitas kerja yang dapat dikatakan baik dan akan tercapai jika Pemerintah Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta melakukan tugas pokok dan fungsinya secara baik.

Kualitas Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diukur dari hasil kerja yang diperoleh selama ini apakah BPBD sudah berjalan dengan penuh tanggung jawab, hanya saja dikarenakan adanya covid-19 membuat pencapaian kinerja belum begitu maksimal, karena BPBD Kabupaten Kapuas juga menjadi SATGAS yang mengatasi Covid-19 hal ini menjadi tugas menjadi banyak yaitu seperti bencana kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi setiap tahun ditambah masa pandemi Covid-19 menjadi masalah besar.

3.2 Ketepatan dan Kepemimpinan

Ketepatan dan Kepemimpinan sangatlah penting dalam melihat kinerja suatu organisasi publik. Ada beberapa hal yang menjadi ukuran bagi suatu organisasi dalam mengukur kualitas layanan organisasinya. Secara umum yaitu ketepatan waktu dan cara kepemimpinan dalam mengatur anggotanya. Sehingga tingkat kepuasan layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan kelompok terhadap kualitas layanan dapat dijadikan sebagai aspek bagi kinerja suatu organisasi publik.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, sarana dan prasarana juga dilihat sebagai penunjang hasil kualitas pelayanan yang diberikan, karena dalam kinerja suatu organisasi publik dalam melayani masyarakat dan merespon kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan sehingga masyarakat akan merasa puas dan merasa terlayani dengan baik. Sehingga sarana dan prasarana yang baik maka akan menimbulkan kepuasan masyarakat yang baik pula.

Ketepatan dalam mengambil keputusan sangat berguna dalam melakukan seperti penanganan kebencanaan dan kepemimpinan juga berpengaruh kepada

bawahan atau anggotanya bahwa cara dari pemimpin untung memberikan motivasi kerja agar menghasilkan kinerja yang baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat terkhusus pada yang mengalami bencana maupun pasca bencana. Bisa dilihat saat ini, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penanggulangan sampai kecamatan yang jauh sekalipun.

3.3 Inisiatif

Inisiatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas kebencanaan menyusun agenda-agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan berbagai program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat bukan hanya saat terjadi bencana saja. Inisiatif menjunjung pada keselarasan antara program-program dan kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat secara langsung menggambarkan kemampuannya dalam menjalankan misi dan tujuan BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu organisasi yang dimana tugasnya memiliki suatu perbedaan karena terkhusus menanggulangi bencana dan selalu siap kapan saja. Aparatur BPBD Kabupaten Kapuas dituntut untuk selalu siap terhadap bencana yang terjadi kapan saja dan harus dapat menanggulangnya secepat mungkin bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut.

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana dalam hal ini harus bersikap lebih responsif lagi terhadap bencana yang terjadi karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang sebagian belum terlaksana secara optimal dalam memberikan sikap yang tanggap yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dengan begitu, diharapkan pencapaian aspek inisiatif yang optimal.

3.4 Kemampuan

Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang baik atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang ada. Kinerja dinas harus baik dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Pihak BPBD sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan prinsip yang telah ada, tetapi memang pada saat itu atas perintah Bupati untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan karena merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya.

Pelaksanaan kegiatan dan program sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku sehingga dapat menunjukkan hasil yang maksimal. Aspek Kemampuan yang sudah bagus dikelola dengan optimal. Khusus penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan BPBD sudah melakukan berbagai upaya dengan kemampuan yang ada seperti penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan alat yang dimiliki, maupun membuat TRC (Tim Reaksi Cepat), serta membangun desa yang tanggap bencana di mana wilayah tersebut jauh dari kantor BPBD.

3.5 Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai kinerja yang bagus, baik itu komunikasi sesama (internal) maupun kerja sama dengan dinas lainnya komunikasi (eksternal). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas yang dilihat dari aspek komunikasi sudah sangat maksimal terlihat hasil observasi penulis melihat antara pimpinan maupun staff sangat akrab apalagi sesama apatur yang menjalankan tugas dalam penanggulangan bencana terlihat kerja sama yang bagus, sedangkan untuk komunikasi dengan luar (eksternal) BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini selalu bekerja sama dengan TNI/POLRI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP, maupun dengan pemadam relawan atau swasta dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, hal ini menjadi bukti bahwa BPBD sudah melakukan komunikasi yang baik ke pihak luar untuk sama-sama menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan ini..

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ketika sedang berlangsungnya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas, berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana dilaksanakan sebelum adanya wabah Covid-19 serta lokasi yang diambil dalam penelitian yang berbeda serta teori dalam pengukuran kinerja sudah berbeda dengan penelitian sebelumnya.

4. Penutup

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas secara keseluruhan masih telah memiliki kinerja yang baik berdasarkan keseluruhan atau pernyataan masyarakat sebagai penerima pelayanan dan juga berdasarkan penilaian secara internal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan pelayanan memiliki hambatan seperti, luasnya wilayah Kabupaten Kapuas, minimnya sarana dan pra sarana, jaringan komunikasi yang belum merata, aparaturnya yang kurang dari kualitas maupun kuantitas dan daerah Kabupaten Kapuas merupakan daerah yang rawan bencana.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas telah banyak melakukan upaya dalam menanggapi hambatan namun dirasa belum cukup sehingga harus lebih dioptimalkan dengan strategi, pemikiran atau ide yang inovatif dengan realisasinya guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.

4.2 Saran



1. Mempertahankan atau meningkatkan kinerja yang sudah ada dengan baik dan melakukan rapat evaluasi secara berkesinambungan guna dalam peningkatan kinerja, dengan berdisiplin, mencintai pekerjaan dan tulus dalam bekerja.
2. Pengoptimalan dan menambah sarana prasarana perlengkapan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Menambah jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas untuk menunjang kerja dalam menaghadapi penaggulangan bencana. Dan memberikan waktu dan kesempatan untuk aparatur berkembang dengan cara memberi pendidikan dan pelatihan, khususnya tentang pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara 5 Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mangkunegara. AA Anwar Prabu. 2012. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Rajawali Pers
- Moeriono, 2014 Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajawali Pers
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia
- Nurjanah, dkk, 2013, Manajemen Bencana Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung. Cv Mandar Maju
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja (edisi 4). Jakarta: Rajawali Pers

B. Perundang-Undangan

- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas

C. Sumber Lainnya

- Sipongi Karhutla Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- <https://kalselpos.com/2020/06/18/bupati-kapuas-pimpin-apel-gabungan-siaga-hadapi-karhutla-2020/>
- <http://www.kaltengpos.co/berita/52901-karhutla-terjadi-di-kapuas-lada-161-hotspot,-115,35-hektare-lahan-terbakar.html>
- Lakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.

()